



# KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450  
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

---

Nomor: 13/Siaran Pers/AL/LI.04.01/5/2019

### UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 14 Mei 2019

#### **Caturwulan I 2019, KY Terima 528 Laporan Masyarakat**

**Jakarta (Komisi Yudisial)** - Sepanjang Januari-April 2019, Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 528 laporan masyarakat dan 325 surat tembusan. Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat (314 laporan), datang langsung ke KY (89 laporan), Penghubung KY (71 laporan), pelaporan online (5 laporan), dan informasi (49 laporan).

Berdasarkan jenis perkara (lihat infografik 2), masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 223 laporan. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 159 laporan. Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif. Perkara lainnya adalah agama, tata usaha negara, dan tindak pidana korupsi (tipikor).

Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan (lihat infografik 2), jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 329 laporan. Kemudian berturut-turut, yaitu Mahkamah Agung sebanyak 38 laporan, peradilan agama sebanyak 32 laporan, dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 28 laporan, dan Tipikor sebanyak 9 laporan.

Sementara itu, 10 propinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY secara berturut-turut (lihat infografik 3) adalah: DKI Jakarta sebanyak 112 laporan, Jawa Timur sebanyak 81 laporan, Sumatera Utara sebanyak 44 laporan, Jawa Tengah sebanyak 42 laporan, Jawa Barat sebanyak 36 laporan, Riau sebanyak 21 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 18 laporan, Banten sebanyak 16 laporan, Sulawesi Selatan sebanyak 14 laporan, dan Kalimantan Timur sebanyak 12 laporan.

Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi. Pada periode ini, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan adalah sebanyak sebanyak 79 laporan masyarakat dengan rincian 34 laporan merupakan sebelum tahun 2019 dan 45 laporan di tahun 2019.

Penyebab rendahnya persentase laporan masyarakat yang dapat diregistrasi karena beberapa alasan, yaitu kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi, laporan bukan kewenangan KY dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA, serta banyak laporan yang ditujukan ke KY berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan. Kurangnya pemahaman masyarakat ini menjadi tantangan KY untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait wewenang KY dan tata cara laporan masyarakat.

**Jaja Ahmad Jayus**

Ketua Komisi Yudisial RI

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

**Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY**

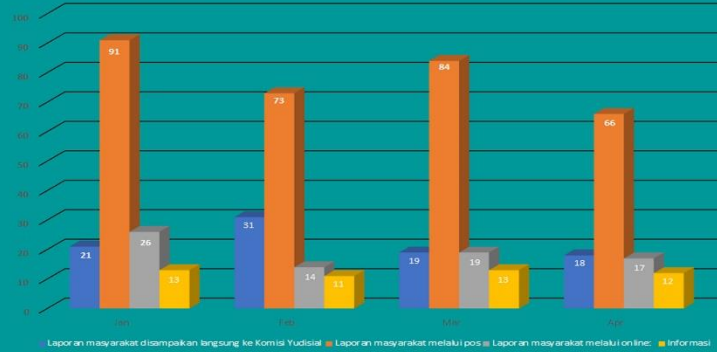
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

[www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

email: [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)

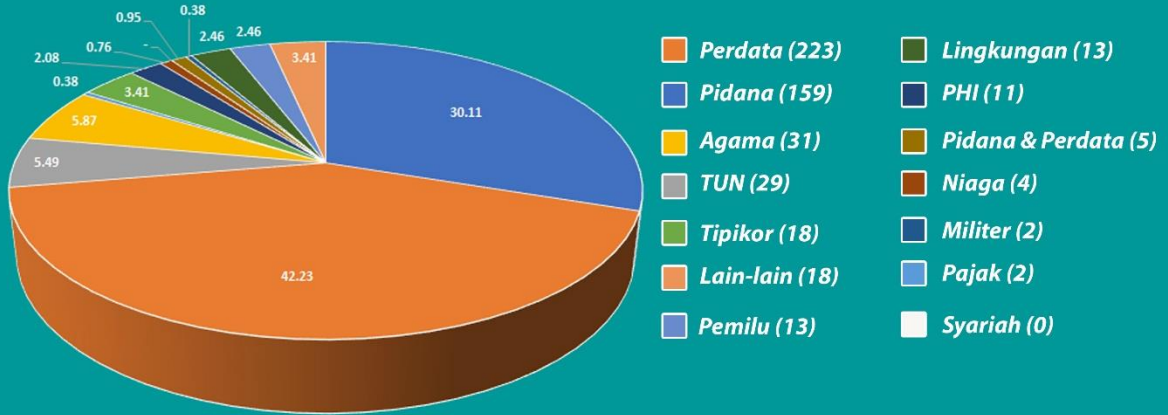
## JUMLAH PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT



Januari s.d. April 2019



**PENERIMAAN LAPORAN BERDASARKAN JENIS PERKARA**



**PENERIMAAN LAPORAN BERDASARKAN BADAN PERADILAN**



10 DAERAH TERBANYAK PENERIMAAN LAPORAN



Provinsi lainnya:

11. Sulawesi Utara	: 12 Laporan	23. Sulawesi Tenggara	: 6 Laporan
12. Kalimantan Barat	: 11 Laporan	24. Kepulauan Riau	: 4 Laporan
13. Sumatera Barat	: 10 Laporan	25. Bengkulu	: 3 Laporan
14. Aceh	: 9 Laporan	26. Bali	: 3 Laporan
15. Lampung	: 9 Laporan	27. Gorontalo	: 3 Laporan
16. DI Yogyakarta	: 9 Laporan	28. Papua	: 3 Laporan
17. Jambi	: 8 Laporan	29. Sulawesi Barat	: 3 Laporan
18. NTT	: 8 Laporan	30. Bangka Belitung	: 2 Laporan
19. Maluku	: 8 Laporan	31. Sulawesi Tengah	: 1 Laporan
20. NTB	: 7 Laporan	32. Maluku Barat	: 0 Laporan
21. Kalimantan Selatan	: 7 Laporan	33. Papua Barat	: 0 Laporan
22. Kalimantan Tengah	: 6 Laporan	34. Kalimantan Utara	: 0 Laporan



## JUMLAH LAPORAN YANG DIREGISTRASI

KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak:

**79**  
Laporan



Penanganan laporan masyarakat dilakukan oleh Tim Penanganan Laporan yang terdiri dari dua tim:

- Tim Penanganan Laporan Pendahuluan (TPP);
- Tim Penanganan Laporan Lanjutan (TPL).

TPP melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Inti dari tahap ini untuk melihat berwenang atau tidaknya Komisi Yudisial menangani laporan masyarakat. Apabila laporan bukan termasuk dalam wewenang dan tugas KY, maka TPP dapat mengusulkan untuk meneruskan laporan kepada lembaga yang berwenang.